

TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH SEBAGAI HIKMAH AL-TASYRI' **TERHADAP HUKUM WALI DALAM PERNIKAHAN**

(Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif)

Oleh: Faisal Azhari 11210010

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Hukum Islam, dalam kajian kitab-kitab *fiqih*, suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Adapun hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan menempati posisi yang sangat penting, karena apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali dari pihak mempelai perempuan, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah atau batal. Dengan begitu peran wali menjadi sangat vital dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan aturan Negara, terlebih menurut hukum Islam.

Dalam Hukum Islam, kedudukan wali nikah sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Abu Musa, bahwa :

عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya : *Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali'.*

Berdasarkan Hadits tersebut dimungkinkan akan muncul sebuah pemahaman bahwa hak untuk menikahkan wanita itu di tangan walinya. Menurut Sayyid Sabiq pengertian wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat

dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹ Jadi sudah jelas bahwa Hukum Islam mengakui adanya hak wali untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dalam kuasanya.

Dalam prinsip *maqashid al syari'ah*, menarik atau mengambil kebaikan (*kemashlahatan*) dan menolak atau menghindari keburukan (*kemafsadatan*). Dari konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, yang mengharuskan wali adalah seorang laki-laki, hal ini menimbulkan gelombang protes dari para pejuang gender. Apalagi jika mencermati pandangan madzhab Imam Hanafi yang tidak memasukkan wali dalam rukun nikah. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa suatu pernikahan dikatakan sah, meskipun tanpa wali. Bahkan menimbulkan implikasi hukum bahwa perempuan boleh menikahkan (mengakadkan) dirinya sendiri, tanpa harus didampingi seorang wali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam perspektif gender?

C. Metode Penelitian

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut : Dar Fikr, 1995), h. 197.

Paradigma yang digunakan adalah tinjauan *maqashid al-syari'ah* menggunakan pendekatan *hermeneutic*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepuustakaan). Adapun sumber data yang dipakai yaitu sumber sekunder yang sudah tertulis dalam literatur kitab fiqh, menggunakan analisis komparatif.

Tinjauan Pustaka

1. *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²

2. Hukum dan Kedudukan perwalian dalam pernikahan

Dari berbagai sumber yang peneliti temukan, menyebutkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Di sinilah peran seorang wali dibutuhkan untuk melakukan akad nikah, sekaligus menjadi wakil dari pihak perempuan. Apabila seorang perempuan tetap bersikeras melakukan akad nikah tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut dikatakan batal. Terutama pernikahan dari orang yang belum *mukallaf*.³

Dalam pandangan imam madzhab terdapat perbedaan tentang kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad. Menurut jumhur ulama' termasuk Syafi'i sepakat bahwa bagi mempelai yang masih kecil, wali merupakan rukun dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan bagi perempuan yang masih kecil tidak dapat melakukan akad

² Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 69.

dengan sendirinya, maka dari itu diperlukan wali untuk menjadi wakil dari perempuan tersebut.

Lain halnya dengan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Adapun bagi perempuan yang telah dewasa, baik masih gadis atau sudah janda, ulama' berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan perbedaan interpretasi pada dalil yang dijadikan dasar dalam konsep perwalian dalam pernikahan.

3. Hermeneutika

Dalam *hermeneutika* Fazlur Rahman, dijelaskan dengan tegas bahwa konteks sosio-historis merupakan faktor utama dalam melahirkan makna sebuah teks, dan penerapan metode gerak ganda (*double movement*) akan menjadikan perintah-perintah Al-Qur'an hidup dan efektif kembali. Adapun metodologi yang digunakan dalam memahami Al-Qur'an adalah metodologi historis, yakni suatu upaya serius, kritis, dan mendalam dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan faktor-faktor luar, seperti faktor social, politik ataupun geografis.⁴

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa teori *hermeneutika* dapat dikatakan sebagai salah satu dari sekian banyak metode yang dapat digunakan untuk menafsirkan teks kitab suci, termasuk Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari nilai sejarah yang terkandung dalam awal kemunculan dan perkembangan *hermeneutika* sampai saat ini.

⁴ M. Faisol, *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 26.

Pembahasan

A. Analisis Perbandingan pendapat Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan

Setelah peneliti melakukan pengkajian dari beberapa sumber yang telah peneliti temukan, kemudian mencermati dan membandingkan pendapat dari kedua Imam madzhab, yaitu pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i maka peneliti menjumpai persamaan dan perbedaan yang mendasar di antara keduanya, sebagai berikut:

No.	Analisis Perbandingan Hukum Wali dalam Pernikahan			
	Variabel	Pendapat Imam Hanafi	Pendapat Imam Syafi'i	Ket.
1	Wali dalam Rukun Nikah	Wali bukan merupakan rukun dalam suatu pernikahan	Wali merupakan rukun dalam suatu pernikahan	Berbeda
2	Pernikahan anak kecil yang belum <i>baligh</i>	Pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum <i>baligh</i> , baik berakal sehat maupun tidak, diwajibkan adanya wali dalam pernikahan	Bagi mempelai pengantin wanita yang masih kecil, belum <i>baligh</i> , maka wali merupakan rukun dalam pernikahan.	Sama
3	Pernikahan perempuan dewasa yang sudah <i>baligh</i>	Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa, yang sudah <i>baligh</i> , berakal sehat baik masih gadis maupun sudah janda, maka diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus melalui wali	Bagi mempelai pengantin wanita yang sudah dewasa, <i>baligh</i> , berakal sehat, maka wali merupakan rukun dalam pernikahan.	Berbeda
4	Urutan wali nikah	Adapun urutan wali adalah sebagai berikut : anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya	Adapun yang lebih berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung,	Berbeda

		anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya	saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim	
--	--	---	---	--

B. Analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam Kajian Hermeneutika

Dalam tingkatan *maqashid dharuriyyat* meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Dalam tingkatan ini, apabila tidak terpenuhi, maka akan membahayakan keberlangsungan umat manusia.

Dalam konteks hukum wali dalam pernikahan, *maqashid dharuriyyat*, khususnya dalam hal *hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan). Dalam hal memelihara keturunan, maka dalam suatu pernikahan diharuskan melibatkan peran wali yang berimplikasi pada dimasukkannya wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

Imam Hanafi berpendapat bahwa dengan memberikan sedikit “kebebasan” bagi perempuan yang sudah dewasa, untuk diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa harus meminta pertimbangan walinya. Hal ini, dikarenakan perempuan yang sudah dewasa, dianggap mampu untuk menentukan sendiri terkait jodoh dan kehidupannya tanpa harus dicampuri oleh walinya.

Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i, yang lebih tegas dalam hal wali dalam suatu pernikahan dengan memasukkan wali ke dalam rukun pernikahan. Dalam kajian *maqashid al-syari'ah*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa peran wali sebagai wakil dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa betapapun dewasanya seorang anak perempuan, masih tetap memerlukan wali sebagai wakil dalam akad nikah.

Sedangkan dalam kajian *hermeneutika*, terkait dengan perbedaan pendapat tentang hukum wali dalam pernikahan, dalam metodologi Fazlur Rahman, merupakan sebuah usaha untuk kontekstualisasi ulang Al-Qur'an berdasarkan kebutuhan masa sekarang. Dengan demikian, dikatakan bahwa dalam gerak ganda (*double movement*), yakni dari masa kini ke masa lalu dan kembali ke masa kini lagi.

Dengan demikian, dengan metodologi *hermeneutika*, dengan semangat sosio-historis, akan dapat diungkap bukan hanya makna lahiriyah dari kata-kata dalam teks Al-Qur'an, akan tetapi juga kepada makna hakiki yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga dapat diketahui tentang konsep *maqashid al-syari'ah* dalam suatu ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an.

C. Analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum perwalian dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam perspektif Gender

Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan Imam Hanafi adalah faktor kedewasaan, serta adanya anggapan bahwa seorang perempuan dianggap mampu untuk menentukan sendiri jodoh serta kehidupannya. Dalam aspek kedewasaan, yang dapat dikatakan "mampu" baik dalam hal finansial (keuangan), kematangan fisik, serta pengalaman hidup yang menjadikannya sebagai perempuan dewasa seperti yang dimaksud dalam pandangan Imam Hanafi tersebut.

Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i yang memasukkan wali ke dalam rukun pernikahan, yang berimplikasi hukum bahwa pernikahan yang dilakukan, baik oleh perempuan yang masih belum *baligh*, maupun sudah dewasa (*baligh*), baik berakal sehat maupun tidak, harus menyertakan wali dalam akad pernikahan. Sehingga wali memiliki hak *ijbar* untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah.

Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan Imam Syafi'i adalah bahwa seorang wali tetap memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak perempuannya. Dengan hak *ijbar* inilah, dimungkinkan bagi wali (orang tua) untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya, karena kondisi anak yang belum mampu untuk bertindak, khususnya dalam melakukan akad pernikahan.

Kesimpulan

1. Dalam analisis tentang perbandingan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terhadap hukum wali dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga perbedaan pendapat dan satu persamaan di antara kedua Imam madzhab tersebut. Perbedaan yang muncul adalah, *pertama* tentang perbedaan dalam memasukkan wali sebagai rukun dalam pernikahan atau bukan. *Kedua*, tentang pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang sudah *baligh* (dewasa), Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali, akan tetapi Imam Syafi'i tetap mensyaratkan wali termasuk dalam rukun yang harus dipenuhi. *Ketiga*, tentang urutan wali dalam pernikahan yang mana Imam Hanafi memasukkan anak, dan cucu dalam urutan wali tersebut, sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan ayah dan kakek yang lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, baik Imam Hanafi maupun Imam Syafi'i mempunyai dasar dalam Al-Qur'an

dan As-Sunnah. Adapun yang menjadikan perbedaan pendapat di atas, adalah mengenai perbedaan penafsiran terhadap teks Al-Qur'an sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap hukum wali dalam pernikahan. Hal ini terkait dengan penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 232, serta beberapa ayat dan sunnah yang lainnya. Sedangkan persamaan yang terdapat dalam pendapat kedua Imam tersebut adalah, sama-sama mewajibkan wali dalam pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang masih belum *baligh*, karena dianggap belum cakap melakukan akad nikah.

2. Dalam analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika disimpulkan bahwa masing-masing Imam madzhab mempunyai dasar pertimbangan khususnya dalam konteks *maqashid al-syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan. Imam Abu Hanifah, tidak mewajibkan wali dalam pernikahan perempuan yang sudah dewasa, dikarenakan pertimbangan *maqashid al-syari'ah* yang memberikan kesempatan lebih bebas, luas, bagi seorang perempuan dalam menentukan jodohnya. Sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan wali dalam pernikahan, karena mempunyai pertimbangan *maqashid al-syari'ah*, wali sebagai seseorang yang membantu perempuan dalam hal mewakili pada saat akad nikah, serta memberikan pertimbangan tentang keikutsertaan wali dalam menentukan keberlangsungan nasab yang tetap terjaga dengan baik, ketika memilihkan calon suami yang kufu' dengan anak perempuannya. Sehingga peran wali sangatlah penting dan menjadi bagian dari rukun dalam pernikahan. Sedangkan dalam kajian *hermeneutika*, yang merupakan bagian dari teori penafsiran kitab suci, maka dengan

metodologi Fazlur Rahman, gerak ganda yang dimaksud adalah, dari masa sekarang, kembali ke masa lalu dan kembali lagi ke masa sekarang. Dengan metode hermeneutika ini dalam memahami *maqashid al-syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan, sehingga memunculkan wajah *hikmah al-tasyri'* yang sesuai dengan realita di masyarakat.

3. Dalam analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam perspektif gender, menyimpulkan bahwa hak *ijbar* wali harus disesuaikan dengan keadaan perempuan yang akan menikah. Ketika perempuan sudah dianggap dewasa, dalam arti mampu baik dalam hal fisik, psikis, maupun finansial, maka wali tidak boleh menghalangi perempuan tersebut untuk menikah. Hal ini dikarenakan faktor kedewasaan yang dia miliki. Dengan demikian, hak *ijbar* wali dapat digugurkan. Sedangkan ketika perempuan belum dewasa, sehingga diperlukan peran wali untuk melindungi hak dan menjadi wakil dalam pernikahan, maka hak *ijbar* wali memiliki peranan penting dalam mengatur pernikahan perempuan yang belum *baligh* (dewasa).